

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Tana Tidung Pada triwulan I Tahun 2021 yaitu di Bulan Januari s/d Maret Tahun 2021 secara bulanan (mtm) mengalami inflasi tertinggi pada bulan maret yaitu sebesar 0,36 persen, secara kalender (ytd) mengalami inflasi tertinggi pada bulan maret yaitu sebesar 0,38 persen dan secara tahunan (yoy) mengalami inflasi tertinggi pada bulan januari yaitu sebesar 1,65 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan dari laju perkembangan inflasi pada Triwulan I Tahun 2021 yang mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami harga tinggi yaitu pada kelompok bahan makanan lainnya yaitu pada sub kelompok sayuran terjadi inflasi sebesar 4.50 persen pada bulan januari dan terjadi deflasi pada sub kelompok buah-buahan yaitu sebesar -6,96 persen. Di bulan Februari terjadi inflasi pada kelompok Bumbu-Bumbuan sebesar 1.85 persen dan terjadi deflasi sebesar -3.40 persen pada sub kelompok ikan segar sedangkan pada bulan Maret terjadi inflasi pada sub kelompok Buah-Buahan yaitu sebesar 7,90 persen dan Deflasi terjadi pada sub kelompok sayuran yaitu sebesar -1,84 persen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Telah berjalannya kegiatan pengawasan terhadap peredaran barang-barang di lingkungan Kabupaten Tana Tidung melalui TPID Kabupaten Tana Tidung; b. Melaksanakan Operasi Pasar untuk meringani beban masyarakat dalam menghadapi masa penyebaran Covid-19; c. TPID Kabupaten Tana Tidung melakukan pemantauan secara langsung terhadap distributor terkait ketersediaan stock barang-barang kebutuhan masyarakat. d. Menjalin kerjasama antar daerah terkait penyaluran barang-barang baik itu melalui transportasi laut maupun darat sehingga kelangkaan barang dapat diatasi. e. Selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi terkait perkembangan TPID Kabupaten baik itu dalam bentuk pelaporan maupun pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. a. Kebijakan : Harus ada tindakan yang tegas dari TPID Kabupaten terkait harga - harga barang yang tidak wajar di lingkungan masyarakat terhadap distributor-distributor yang mempermainkan harga barang di lapangan. b. Evaluasi : Memberikan sanksi baik itu tertulis maupun lisan terhadap oknum- oknum yang mempermainkan harga barang yang tidak wajar di lapangan. 2. a. Kebijakan : Melakukan kerjasama antar daerah terkait jalur transportasi pendistribusian barang - barang masuk ke daerah Kabupaten Tana Tidung. b. Evaluasi : Perlunya direncanakan berdirinya BUMD Pangan di Kabupaten Tana Tidung sebagai pengatur stock ketersediaan barang-barang baik dari Pemerintah Provinsi maupun antar Kabupaten yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 3. a. Kebijakan : Perlunya melakukan rapat di tingkat teknis secara rutin sehingga kendala dan permasalahan yang di hadapi di lapangan dapat di tindak lanjuti. b. Evaluasi : Dalam pelaksanaan rapat antar tingkat teknis diharapkan dapat memberikan masukan dan saran mengenai perkembangan inflasi yang ada di daerah dan permasalahan lainnya, sehingga dapat memberikan keputusan dan kebijakan dalam hal mengatasi permasalahan tersebut. 4. a. Kebijakan : Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah di Wilayah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan kesepakatan bersama TPID Kabupaten. b. Evaluasi : Perlunya peningkatan waktu dalam pelaksanaan Operasi Pasar dan

Pasar Murah sehingga benar – benar dapat meringankan kebutuhan masyarakat terutama pada masa Covid-19. 5. a. Kebijakan : Antisipasi yang efektif terhadap lonjakan harga barang-barang di pasaran yang dapat menimbulkan tingkat Inflasi yang tinggi. b. Evaluasi : TPID Kabupaten harus Melakukan sidak secara langsung di lapangan terkait harga-harga barang yang beredar di lapangan 6. a. Kebijakan : Perlunya membuat himbauan kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung melalui OPD yang bersangkutan bekerja sama secara langsung dengan aparat Desa agar melakukan Produktivitas Pertanian yang memiliki andil dominan terhadap tingginya Inflasi yang selalu terjadi. b. Evaluasi : Diharapkan himbauan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat di terapkan dan dilaksanakan oleh pihak Desa dan Masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Tana Tidung untuk masyarakat setempat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pengendalian Inflasi Volatile Foods/Pangan. • Melakukan pemantauan secara langsung terhadap pergerakan harga kelompok barang yang berpotensi penyumbang inflasi baik pada saat hari-hari tertentu maupun pada kondisi sekarang yaitu dengan adanya penyebaran Covid-19 pada saat ini. • Adanya Peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan Operasi Pasar untuk mengantisipasi jika terjadinya kelangkaan barang dan adanya peningkatan harga barang di pasaran. Ada central pasar Ramadhan (Bazaar) ketika terjadi gejolak harga dan kerjasama dengan distributor yang membuat harga menjadi stabil. • Selalu melakukan pengawasan secara langsung terhadap penyaluran Distributor-distributor yang ada di Kabupaten sehingga kelangkaan barang dapat di ketahui. • Penegakan Regulasi dan Penetapan Batas Atas dan Batas Bawah terhadap harga kelompok barang penyumbang inflasi.
2. Pengendalian Inflasi terkait Ketersediaan Pasokan • Penguatan peran OPD terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas pertanian Pangan dan Perikanan. • Melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan stok ketersediaan barang. • Menyesuaikan jadwal panen komoditas pangan dengan perkiraan puncak kebutuhan.
3. Pengendalian Inflasi terkait Keterjangkauan Harga • Melakukan sidak pasar secara langsung. • Pelaksanaan pasar penyeimbang untuk menyediakan komoditas strategis dengan harga yang wajar dan terjangkau. • Melakukan pemantauan pergerakan harga komoditas strategis terutama sembilan bahan pokok.
4. Pengendalian Inflasi terkait Kelancaran Distribusi • Bekerjasama dengan asosiasi, distributor, maupun pedagang besar komoditas pangan. • Melakukan sidak pasar atas kemungkinan adanya penimbunan komoditas pangan oleh oknum tertentu.
5. Pengendalian Inflasi terkait Komunikasi Efektif • Penguatan komunikasi dan koordinasi TPID dengan seluruh stakeholders terkait. • Mengkomunikasikan keberadaan pemerintah daerah dan program-program pengendalian inflasi kepada masyarakat seperti operasi pasar murah.